



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

.....
.....

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2025



.....
.....
.....

Jl. APT. PRANOTO NO. 83 KEL. SUKARAME
TELP. 0541 - 662053 FAX. 0541 - 662053
Email : distransnaker@kukarkab.go.id
Website : distransnaker.kukarkab.go.id



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah banyak memberikan limpahan rahmat serta hidayahnya sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 dapat terselesaikan dengan baik.

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 ini merupakan salah satu tolok ukur untuk perencanaan program dan kegiatan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian tahun 2024. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan 2025 mempunyai maksud dan tujuan untuk menjadi dasar dalam menetapkan kinerja tahunan sehingga dapat menjadi alat untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran organisasi, juga untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 ini masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Untuk itu kami mohon saran dan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaannya serta terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunannya. Semoga Rencana Kinerja Tahunan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dalam melaksanakan pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

Tenggarong, Januari 2025

PIL. KEPALA DINAS

M. Hafa, SE, M.Si
Peminda Tk.I – (IV/b)
NIP. 19670815 200012 1 005



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Dasar Hukum.....	2
I.3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	4
I.3.1. Tugas Pokok dan Fungsi	4
I.4. Susunan Organisasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	4
BAB II. RENCANA STRATEGIS	6
II.1. Rencana Strategis Tahun 2021-2026	6
II.2. Program dan Kegiatan.....	7
II.3. Target dan Realisasi Renstra 2021-2026.....	9
II.4. Program, Kegiatan dan Anggaran.....	18
BAB III. PENUTUP	27



DAFTAR TABEL

TABEL 2.1

Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Target 7

TABEL 2.2

Target, Capaian dan Realisasi Tahun 2022-2024 10

TABEL 2.3

Program/Kegiatan, Pagu dan Realisasi Capaian Keuangan Tahun 2024 11

TABEL 2.4

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 18



BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Rencana Kinerja Tahunan adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kinerja Tahunan memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam system perencanaan daerah, karena merupakan produk perencanaan terkecil pada unit organisasi Pemerintah Daerah. Rencana Kinerja Tahunan pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2025 merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja berhubungan langsung dengan pelayanan sehingga Kualitas penyusunan Rencana Kerja Tahunan akan menentukan kualitas pelayanan pada Pimpinan dalam kaitan mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Proses penyusunannya dimulai dengan persiapan penyusunan Rencana Kinerja dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisa gambaran pelayanan untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja tahun lalu, dan Renstra Perangkat Daerah yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Rancangan Kinerja Tahunan, adalah sebagai berikut:

- A. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
- B. Rumusan program/kegiatan/sub kegiatan di dalam Rencana Kinerja Tahunan didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan



- dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah;
- C. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
 - D. Program dan kegiatan /sub kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$.

Keterkaitan Rencana Kinerja Tahunan dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Rencana Kerja Tahunan merupakan penjabaran dana dan hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra Perangkat daerah dan RKPD. Rencana Kinerja Tahunan merupakan masukan Utama bagi penyusunan RKPD, dasar penyusunan RKA-DPA. Maksud dari Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja adalah untuk melaksanakan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada 31 Desember 2025 yang menggambarkan capaian kinerja.

I.2. Dasar Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan ini adalah berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan;



6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Permenpan Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja;
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 65 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja instansi pemerintah di lingkungan pemerintah daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026
15. Peraturan Daerah No. 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten Kutai Kartanegara;
16. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 58 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja pangkat daerah pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.



I.3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

I.3.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 58 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja maka Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai

tugas pokok :

“Membantu Bupati, meaksanakan Urusan Pemerintahan ynag menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja”

Dalam melaksanakan tugas pokok diatas Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara menyelenggarakan

fungsi :

1. Merumuskan kebijakan di Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Transmigrasi da Tenaga Kerja;
3. Pelaksanaan evaluasi di Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas di Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati Pelaksanaan Unit

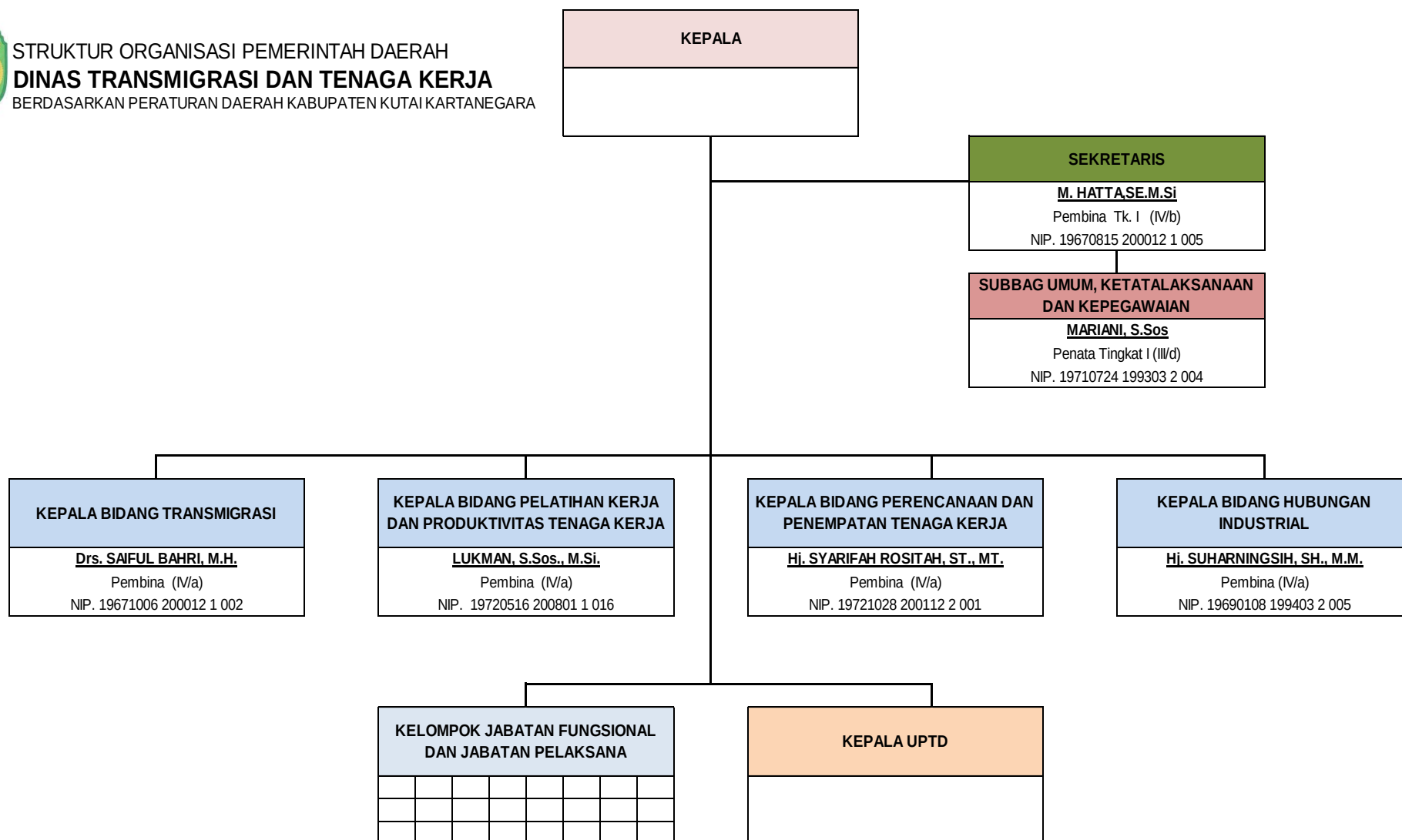
I.4. Susunan Organisasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

Susunan Organisasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, Membawahi:
 1. Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
- c. Bidang Transmigrasi;
- d. Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- e. Bidang Perencanaan dan Penempatan Tenaga Kerja;
- f. Bidang Hubungan Industrial;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.



STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA





BAB II

RENCANA STRATEGIS

II.1. Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Perangkat daerah menyusun Rencana Program yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, dengan Visi : “Mewujudkan Masyarakat kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”, dan Misi ke-2 yaitu Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya, dengan Program Prioritas Pembangunan Daerah “PROGRAM KUKAR SIAP KERJA”.

Dirumuskan dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung 2021-2024, Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Lampung mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

A. Tujuan

Tujuan Rencana Strategis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu ;

1. Meningkatnya kesempatan dan perluasan kerja bagi pencari kerja.
2. Meningkatnya partisipasi Pemerintah daerah dan swasta dalam pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.
3. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah yang Berkualitas dan Melayani.

B. Sasaran

Untuk mencapai tujuan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja tersebut ditetapkan 4 (empat) sasaran yaitu :

1. Meningkatnya kompetensi tenaga kerja yang produktif dan berdaya saing
2. Meningkatnya Penempatan tenaga kerja sesuai Informasi kebutuhan Pasar Kerja dan wirausahawan baru
3. Meningkatnya hubungan Industrial yang harmonis dan Dinamis
4. Meningkatnya Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan kawasan Transmigrasi baru

Selanjutnya berdasarkan sasaran tersebut ditetapkan indikator sasaran, sebagai berikut :



Tabel 2.1
Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Target
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja yang produktif dan berdaya saing	Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat Kompetensi	Persen	24,34	Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
2.	Meningkatnya Penempatan tenaga kerja sesuai Informasi kebutuhan Pasar Kerja dan wirausahawan baru	Persentase Pencari Kerja yang terdaftar ditempatkan	Persen	12,35	Bidang Perencanaan dan Penempatan Tenaga Kerja
3.	Meningkatnya hubungan Industrial yang harmonis dan Dinamis	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang di fasilitasi	Persen	100	Bidang Hubungan Industrial
4.	Meningkatnya Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan kawasan Transmigrasi baru	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang direncanakan di bangun dan di kembangkan	Dokumen	5	Bidang Transmigrasi

II.2. Program dan kegiatan

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah diikuti dengan dilakukannya perubahan dalam dokumen perencanaan, termasuk Rencana Strategis yang memuat tentang Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta indikator dan target Perangkat Daerah selama 5 tahun.

Sesuai tugas dan fungsinya maka selama kurun waktu 2021-2026 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara akan melaksanakan 7 (tujuh) program, yang didukung oleh 18 (delapan belas) kegiatan dan 47 (empat puluh tujuh) sub kegiatan sebagai berikut :



1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sasaran Program : Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

Kegiatan :

- a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
- d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
- e) Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- f) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- g) Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- h) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

2. Program Pelatihan kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Sasaran Program : Meningkatnya kompetensi tenaga kerja yang produktif dan berdaya saing,

Kegiatan :

- a) Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi.
- b) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.
- c) Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

3. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Sasaran Program : Meningkatnya Penempatan tenaga kerja sesuai Informasi kebutuhan Pasar Kerja dan wirausahawan baru

Kegiatan :

- a) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK).

4. Program Penempatan Tenaga Kerja

Sasaran Program : Meningkatnya Penempatan tenaga kerja sesuai Informasi kebutuhan Pasar Kerja dan wirausahawan baru.



Kegiatan :

- a) Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota.
- b) Pengelolaan Informasi Pasar Kerja.

5. Program Hubungan Industrial

Sasaran Program : Meningkatnya hubungan Industrial yang harmonis dan Dinamis

Kegiatan :

- a) Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- b) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.

6. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi

Sasaran Program : Meningkatnya Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan kawasan Transmigrasi baru

Kegiatan :

- a) Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi.

7. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Sasaran Program : Meningkatnya Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan kawasan Transmigrasi baru.

Kegiatan :

- a) Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian.

II.3 Target dan Realisasi Renstra 2021-2026

Target dan Realisasi Tahun 2022-2024 dapat dilihat sebagai berikut :



Tabel 2.2
Target, Capaian dan Realisasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Tahun 2022-2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET DAN REALISASI					
				TARGET 2022	REALISASI	TARGET 2023	REALISASI	TARGET 2024	REALISASI
1.	Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Pedikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Nilai	70,11	79,29	71,30	81,80	71,50	70,92
2.	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja yang Produktif dan Berdaya Saing	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	14,75	15,38	18,59	22,90	20,50	22,77
3.	Meningkatnya Penempatan tenaga kerja sesuai Informasi kebutuhan Pasar Kerja dan wirausahawan baru	Persentase Pencari Kerja yang terdaftar ditempatkan	Persen	6,14	8,02	8,39	13,75	10,37	18,86
4.	Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis dan Dinamis	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang di fasilitasi	Persen	100	100	100	100	100	100
5.	Meningkatnya Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan kawasan Transmigrasi baru	Jumlah Kawasan Desa/Kimtrans yang ditata/dibangun	Dokumen	2	2	4	3	4	4

Dari tabel 2.2 dapat disimpulkan bahwa di akhir periode di tahun 2024, terhadap 5 indikator kinerja yang telah ditetapkan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk masing-masing sasaran diperoleh capaian kinerja 100%.

Selanjutnya rincian realisasi anggaran Tahun 2024 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :



Tabel 2.3
Program/Kegiatan, Pagu dan Realisasi Capaian Keuangan
Tahun 2024

N O	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PAGU INDIKATIF	REALISASI	PERSENTAS E (%)
		PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)					
		Tolak Ukur/Indikator	Targ et	Satuan			
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH			15.094.099.333	12.552.570.451	82,16
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah			450.000.000	321.931.554	71,54
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	350.000.000	259.613.054	74,17
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Laporan	100.000.000	62.318.500	62,31
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah			10.139.876.880	8.653.286.357	85,33
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69	Orang/ Bulan	9.989.876.880	8.533.818.557	85,42
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	150.000.000	119.467.800	79,64
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah aset daerah yang di pelihara			82.200.000	65.600.000	79,80
5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	82.200.000	65.600.000	79,80
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur Sipil Negara			385.000.000	274.428.570	71,28
6	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Dokumen	50.000.000	32.338.741	79,64
7	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen	30.000.000	27.550.000	91,83



N O	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PAGU INDIKATIF	REALISASI	PERSENTAS E (%)
		PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)					
		Tolak Ukur/Indikator	Targ et	Satuan			
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	Orang	100.000.000	66.601.135	66,60
9	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	83	Orang	50.000.000	30.706.051	61,41
10	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15	Orang	155.000.000	117.232.643	75,63
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum			959.700.000	804.551.417	83,83
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	29.700.000	29.151.000	98,15
12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1	Paket	50.000.000	29.403.700	58,80
13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	50.000.000	13.360.400	26,72
14	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	180.000.000	163.190.850	90,66
15	Penyediaan Bahan/Materai	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	2	Paket	75.000.000	36.194.000	48,25
16	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1	Laporan	25.000.000	15.514.500	62,05
17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	57	Laporan	450.000.000	420.495.567	93,44
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit BMD yang diadakan			1.601.000.000	1.145.504.250	71,54
18	Pengadaan Gedung	Jumlah Unit	2	Unit	1.601.000.000	1.145.504.25	71,54



N O	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PAGU INDIKATIF	REALISASI	PERSENTAS E (%)
		PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)					
		Tolak Ukur/Indikator	Targ et	Satuan			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan				0	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan			1.100.280.522	1.002.596.053	91,12
19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	4.000.000	3.990.000	99,75
20	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	Laporan	229.827.998	199.040.685	86,60
21	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	umlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	100.000.000	79.325.000	79,32
22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	766.452.524	720.240.368	93,97
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Aset yang di pelihara			376.041.931	284.672.250	75,70
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24	Unit	276.041.931	188.499.350	68,28
24	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	100.000.000	96.172.900	96,17
II	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PERSENTASE TENAGA KERJA BERSERTIFIKAT KOMPETENSI			16.052.340.000	11.567.169.818	72,05
	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan			15.952.340.000	11.512.773.618	72,17
25	Proses pelaksanaan pendidikan dan	Jumlah Tenaga Kerja yang	577	Orang	15.952.340.000	11.512.773.618	72,17



N O	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PAGU INDIKATIF	REALISASI	PERSENTAS E (%)
		PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)					
		Tolak Ukur/Indikator	Targ et	Satuan			
1	2	3	4	5	6	7	8
	pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi					
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina			25.000.000	21.335.000	85,34
26	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	15	Lembaga	25.000.000	21.335.000	85,34
	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas			25.000.000	21.240.000	84,96
27	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	25	Perusahaan	25.000.000	21.240.000	84,96
III	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	CAKUPAN LAYANAN DATA INFORMASI TENAGA KERJA di WILAYAH KECAMATAN			100.000.000	94.394.740	94,39
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Data Rencana Tenaga Kerja Daerah			100.000.000	94.394.740	94,39
28	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro kabupaten/kota	15	Orang	100.000.000	94.394.740	94,39
IV	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	PERSENTASE TENAGA KERJA YANG DITEMPATKAN			8.672.399.000	7.715.264.852	88,96
	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Antar Kerja			8.472.399.000	7.533.555.452	88,91
29	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	30	Orang	75.000.000	67.403.000	89,.87
30	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan	25	Orang	50.000.000	46.950.000	93,90



N O	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PAGU INDIKATIF	REALISASI	PERSENTAS E (%)
		PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)					
		Tolak Ukur/Indikator	Targ et	Satuan			
1	2	3	4	5	6	7	8
		Melalui Layanan AKAD dan AKL					
31	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	30	Orang	93.399.000	88.286.200	94,52
32	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	705	Orang	8.254.000.000	7.330.916.25 2	88,81
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Layanan Antar Kerja			200.000.000	181.709.400	90,85
33	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	60	Orang	200.000.000	181.709.400	90,85
V	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	PERSENTASE KASUSU PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG TERFASILITASI			11.271.341.700	9.912.045.83 0	87,94
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan dan Perjanjian Kerja yang dicatatkan Serta Perjanjian Kerja Bersama yang di Daftarkan			462.000.000	330.349.480	71,50
34	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	10	Perusahaan	50.000.000	41.725.000	83,45
35	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	2	Laporan	362.000.000	254.749.080	70,37



N O	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PAGU INDIKATIF	REALISASI	PERSENTAS E (%)
		PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)					
		Tolak Ukur/Indikator	Targ et	Satuan			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Perusahaan yang Melaksanakan Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan			10.809.341.700	9.581.696.350	88,64
36	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	15	Perkara	50.000.000	39.098.000	78,19
37	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	80	Perkara	50.000.000	42.125.000	84,25
38	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	6	Asosiasi	50.000.000	29.675.000	59,35
39	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1	Lembaga	50.000.000	41.386.000	82,72
40	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	35.440	Orang	10.609.341.700	9.429.412.350	88,87
VI	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Rencana Pengembangan Kawasan Desa/Kimtrans			1.100.000.000	664.909.600	60,44



N O	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PAGU INDIKATIF	REALISASI	PERSENTAS E (%)
		PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)					
		Tolak Ukur/Indikator	Targ et	Satuan			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Rencana pengembangan Kawasan Desa/Kimtrans			1.100.000.000	664.909.600	60,44
41	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigras	1	Kawasan	800.000.000	534.359.100	66,79
42	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	1	Dokumen	300.000.000	130.550.500	43,51
VII	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Kawasan Desa/Kimtrans yang di Kembangkan			300.000.000	284.095.500	94,69
	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah Desa/Kimtrans yang di Kembangkan			300.000.000	284.095.500	94,69
43	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	40	Kepala Keluarga (KK)	150.000.000	138.697.000	92,46
44	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	15	Satuan Permukiman	150.000.000	145.398.500	96,93
JUMLAH					52.590.180.033	42.790.450.791	81,36

Berdasarkan tabel diatas pagu anggaran tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 52.590.180.033,- dengan capaian realisasi sebesar Rp. 42.790.450.791,- atau sebesar 81,36%. Diharapkan tahun 2025 persentase penyerapan anggaran lebih baik dari tahun sebelumnya.



II.4. Program, Kegiatan dan Anggaran

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja dan peningkatan pelayanan publik serta peningkatan sumber daya aparatur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara dapat disusun Program dan Kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah, program urusan wajib dan program urusan pilihan seperti pada Tabel dibawah ini:

TABEL 2.4
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2025
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025	
					TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
I	Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75,30%	16.097.282.139
I			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	1.000.000.000
1			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000
2			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorl Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	250.000.000
3			Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	50.000.000
4			Penyusunan Dokumen	jumlah dokumen Perencanaan	3 Dokumen	



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025	
					TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
			Perencanaan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah		450.000.000
5			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	1 Laporan	50.000.000
6			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	150.000.000
II			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	9.637.370.252
7			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 orang/ bulan	9.437.370.252
8			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	25.000.000
9			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	150.000.000
10			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	25.000.000
III			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD Yang Mendapatkan Pengamanan	1 Laporan	105.000.000
11			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	25.000.000
12			Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	50.000.000
13			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	30.000.000



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025	
					TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
IV			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur Sipil Negara	124 Orang	505.000.000
14			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	83 Orang	100.000.000
15			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	50.000.000
16			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	100.000.000
17			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	150.000.000
18			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	69 Orang	50.000.000
19			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	55.000.000
V			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum	8 Layanan	529.700.000
20			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	29.700.000
21			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000
22			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	50.000.000
23			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025	
					TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
24			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50.000.000
25			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	25.000.000
26			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	25.000.000
27			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	250.000.000
VI			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit BMD yang diadakan	2 Unit	2.749.250.000
28			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 Unit	2.149.250.000
29			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	600.000.000
VII			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	1.044.919.956
30			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.000.000
31			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	300.000.000
32			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	69.867.000
33			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	671.052.956
VIII			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang di pelihara	30 Unit	526.041.931



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025	
					TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
			Pemerintahan Daerah			
34			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit	276.041.931
35			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150.000.000
36			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	100.000.000
II	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja yang produktif dan berdaya saing,	Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat Kompetensi	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	26,27%	8.003.540.000
				Penyediaan Pusat Latihan Tenaga Kerja	3 Unit	
IX			Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	589 Orang	7.903.540.000
37			Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	589 Orang	7.903.540.000
X			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja yang tersedia	15 Lembaga	25.000.000
38			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	15 Lembaga	25.000.000
XI			Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan kecil yang produktif	15 Perusahaan	25.000.000
39			Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	25 Perusahaan	25.000.000
XII			Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produktivitas yang terukur	25 Persen	50.000.000
40			Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen hasil pengukuran produktivitas da daya saing tenaga kerja di	1 Dokumen	50.000.000



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025	
					TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
				tingkat Daerah		
III	Meningkatnya Penempatan tenaga kerja sesuai Informasi kebutuhan Pasar Kerja dan wirausahawan baru	Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar Ditempatkan	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Tersedianya Data Rencana Tenaga Kerja Daerah	100%	450.000.000
XIII			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Data Rencana Tenaga Kerja Daerah	1 Dokumen	450.000.000
41			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	300.000.000
42			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro kabupaten/kota.	20 Orang	150.000.000
IV	Meningkatnya Penempatan tenaga kerja sesuai Informasi kebutuhan Pasar Kerja dan wirausahawan baru	Persentase Pencari Kerja yang terdaftar ditempatkan	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam/Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten	12,35%	9.060.000.000
XIV			Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan antar kerja	2 Layanan	8.710.000.000
43			Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lainlain untuk Peningkatan Kompetensi	60 Orang	300.000.000
44			Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	50 Orang	100.000.000
45			Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	100 Orang	200.000.000
46			Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	30 Orang	150.000.000
47			Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan	671 Orang	7.960.000.000



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025	
					TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
				485Kesempatan Kerja		
XV			Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	50.000.000
48			Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	10 Lembaga	50.000.000
XVI			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah informasi pasar kerja	1 Event	300.000.000
49			Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	100 Orang	300.000.000
V	Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang di fasilitasi	Program Hubungan Industrial	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang di Fasilitasi	100%	11.386.704.000
XVII			Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan.dan perjanjian kerja yang di catatkan serta perjanjian kerja bersama yang di daftarkan	28 Perusahaan	462.000.000
50			Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	25 Perusahaan	150.000.000
51			Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	25 Perusahaan	100.000.000
52			Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	2 Laporan	212.000.000



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025	
					TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
XVIII			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas perusahaan yang melaksanakan peraturan perundang undangan	65 Perusahaan	10.924.704.000
53			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	50 Perkara	200.000.000
54			Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	100 Perkara	150.000.000
55			Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	6 Asosiasi	150.000.000
56			Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	100.000.000
57			Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	48.729 Orang	10.324.704.000
VI	Meningkatnya Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan kawasan Transmigrasi baru	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang di rencanakan	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Rencana Pengembangan Kawasan Desa/Kimtrans	1 Dokumen	650.000.000
XIX			Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT)	1 Dokumen	650.000.000



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025	
					TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
58			Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	2 Dokumen	650.000.000
VII	Meningkatnya Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan kawasan Transmigrasi baru	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang di Kembangkan	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan Desa/Kimtrans yang dikembangkan	1 Dokumen	750.000.000,00
XX			Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Terlaksananya kegiatan pengembangan di Kawasan Trasn migrasi	1 Dokumen	750.000.000
59			Penguatan SDM dalam Rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	70 KK	450.000.000
60			Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	2 Satuan Permukiman	300.000.000
JUMLAH						46.397.526139



BAB III PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah (RKT-PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKT-PD disusun dengan mempedomani Rencana Strategis (Renstra) PD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), diantaranya memuat kebijakan, program kegiatan dan sub-kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025 ini berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2025 sehingga menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggungjawab Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, dan diharapkan dapat memberikan solusi dalam setiap gerak dan langkah yang ditempuh, agar tidak terjadinya berbagai hambatan.

Rencana Kinerja Tahunan ini secara umum menguraikan program, kegiatan dan sub-kegiatan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja serta indikator dan target kinerja dimana untuk program yang dinyatakan dalam sasaran hasil (Outcomes). Maka dengan mempedomani Rencana Kinerja Tahunan ini dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagaimana telah tertuang dalam DPA-PD, diharapkan dapat terlaksana dalam upaya meningkatkan kinerja PD untuk mendukung pencapaian visi misi Bupati Kutai Kartanegara. Yang terpenting bahwa Rencana Kinerja Tahunan ini akan dapat tercapai dengan komitmen dari seluruh unsur pimpinan dan staf yang disertai pengabdian yang tinggi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta menjunjung tinggi nilai-nilai pengabdian kepada masyarakat.

Semoga dengan telah disusunnya rencana kinerja tahunan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 ini dapat dijadikan dasar dalam penyusunan program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran dan tujuan organisasi serta sebagai komponen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi



Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan telah tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah ini, apabila dalam periode pelaksanaan Rencana Kinerja ini dihadapkan pada hal-hal yang membuat Rencana Kinerja tidak dapat dilaksanakan maka ditinjau kembali untuk dilakukan revisi sesuai dengan situasi dan kondisi.

Tenggarong, Januari 2025



PIL. KERALA DINAS

M. Haha, SE, M.Si

Pembina Tk. I – (IV/b)

NIP. 19670815 200012 1 005

.....
.....
.....



.....
.....
.....